

**IMPLEMENTASI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM TRADISI *TUKUR*
UNTUK MEWUJUDKAN RESPONSIF GENDER
(STUDI KASUS MASYARAKAT MODERN SUKU BATAK KARO)**

Oleh

Aichel Jansmanta Ginting

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait (1) Implementasi pasal 31 Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam penerapan tradisi tukur (mahar) di masyarakat adat batak karo; (2) Sanksi adat terhadap masyarakat adat batak karo yang tidak menerapkan tradisi *tukur* (mahar). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan jenis observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk menarik kesimpulan relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat adat Batak Karo yang tinggal di Kota sudah mulai meninggalkan tradisi adat istiadat yang ada khususnya tradisi tukur (mahar) sehingga masih banyak ketidaksetaraan gender yang ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. (2) Sanksi adat yang didapatkan yaitu jika pasangan suami istri tersebut tidak membayarkan tukur (mahar) maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh adat dan juga berdampak kepada keturunan pasangan suami istri tersebut. Dampak yang diterima oleh keturunan suami istri tersebut yaitu tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adat. Selain itu pasangan suami istri yang tidak membayar tukur (mahar) meninggal dunia, maka pihak keluarga tidak diperbolehkan melakukan upacara adat kematian.

Kata Kunci : Tukur, Hukum Adat Batak Karo, Gender.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 31 OF LAW NO.16 OF 2019 CONCERNING
MARRIAGE IN THE TUKUR TRADITION TO REALIZE GENDER
RESPONSIVENESS (CASE STUDY OF THE BATAK KARO TRIBE COMMUNITY)**

By

Aichel Jansmanta Ginting

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze related (1) Implementation of article 31 of Law No. 16 of 2019 concerning marriage in the application of the tukur (dowry) tradition in the Batak Karo traditional community; (2) Customary sanctions against the Batak Karo indigenous people who do not implement the tukur (dowry) tradition. This research is empirical legal research that uses observation, interviews and literature studies. The legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials which are useful for drawing conclusions relevant to the problems in this research. The results of the research show that (1) the Karo Batak indigenous people who live in the city have begun to die out existing traditional traditions, especially the tukur (dowry) tradition, so that there are still many gender inequalities found in household life. (2) The customary sanction obtained is that if the husband and wife do not pay the tukur (dowry) then the marriage is considered invalid by custom and also has an impact on the descendants of the husband and wife. The impact received by the husband and wife's descendants is that they are not allowed to carry out traditional marriages. Apart from that, when a husband and wife do not pay the tukur (dowry) when they die, the family is not allowed to carry out traditional death ceremonies.

Keywords : *Tukur, Batak Karo Customary Law, Gender*

